

**TAHUN
2020**



LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Kenari No.14 A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. 0274-555836 Fax. 0274-555842

<http://www.bpbd.jogjaprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kami atas nama BPBD DIY menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Secara singkat Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi yang mencakup unsur unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan ditetapkan sebesar	Rp0,00
Realisasinya mencapai sebesar	Rp1.390.865.513,00
Sehingga kurang dari target sebesar	Rp1.390.856.513,00
Atau sebesar 0%	
B. Belanja ditetapkan sebesar	Rp24.576.619.707,00
Realisasinya mencapai sebesar	Rp22.634.196.360,00
Sehingga kurang dari target sebesar	Rp1.942.423.347,00
Atau sebesar 7,9%	

C. Surplus/Defisit Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp(24.576.619.707,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp(21.243.339.847,00) atau sebesar 86,44%

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BPBD DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2020.

Jumlah Aset 31 Desember 2020 sebesar	Rp108.966.147.160,38
Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp61.572.540.961,78
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp0,00
Persediaan	Rp61.572.452.946,78
Aset tetap sebesar	Rp46.123.136.698,60
Dana Cadangan sebesar	Rp0,00
Dan Aset lainnya sebesar	Rp1.270.469.500,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar	Rp36.084.028,00
Yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar	Rp36.084.028,00
serta dari Kewajiban jangka panjang sebesar	Rp0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar	Rp108.930.063.132,38

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber data ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BPBD DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah LO	Rp0,00
Pendapatan Transfer LO	Rp0,00
Lain lain Pendapatan yang sah LO	Rp0,00
Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp27.978.674.916,00
Beban terdiri dari :	
Beban Operasi	Rp16.570.628.821,16
Beban Luar Biasa	Rp265.756.533.763,04
Surplus/Defisit Operasional	(Rp254.348.487.668,20)
Surplus Laporan Operasional	(Rp254.348.487.668,20)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp72.009.703.135,58
Surplus Laporan Operasional	Rp(254.348.487.668,20)
RK PPKD	Rp21.243.339.847,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp270.025.507.818,00
Ekuitas Akhir	Rp108.930.063.132,38

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan LO, beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharap tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholder*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala Pelaksana

Drs. BIWARA YUSWANTANA, MSi

NIP. 19630817 198909 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
1. JUDUL.....	i
2. KATA PENGANTAR.....	ii
3. DAFTAR ISI.....	vi
4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
5. LAPORAN REALISASI APBD (LRA) Versi SAP (LRA64).....	ix
6. LAPORAN REALISASI APBD (LRA) Versi APBD (LRA13).....	x
7. LAPORAN OPERASIOANAL (LO).....	Xi
8. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	xii
9. NERACA.....	xiii
10. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	7
BAB III PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN.....	10
BAB IV PENUTUP.....	26

LAMPIRAN

A. Lampiran LRA

1. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Rekapitulasi LRA menurut Urusan Pemerinta Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
3. Penjabaran LRA

B. Lampiran Neraca

1. Kertas Kerja Penyusutan Laporan keuangan SKPD
2. Berita Acara Penutupan Kas
3. Register Penutupan Kas
4. Berita Acara Pemeriksaan Kas

5. Register Pemeriksaan Kas
6. Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)
7. Berita Acara Stock Opname Persediaan
8. Rekapitulasi Belanja Modal
9. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya
10. Kertas Kerja Mutasi Persediaan (aplikasi) sesuai Hasil Rekon antara Pengelola Akuntansi dan Penyimpan Barang
11. Rekap Penyusutan Aset tetap dan Rekap Penyusutan Aset lainnya
12. Rincian per Jenis Aset Tetap

CALK BPBD DIY 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kenari No.14 A Telepon : (0274) 555836, 555585, Fax.(0274) 555326
YOGYAKARTA 55166

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala Pelaksana

Drs. BIWARA YUSWANTANA,MSi
NIP. 19630817 198909 1 001

**CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN (CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPBD DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPBD DIY:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Aset

3.1.4 Kewajiban

3.1.5 Ekuitas

3.1.6 Pendapatan-LO

3.1.7 Beban

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup

CALK BPBD DIY 2020

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
BPBD DIY					
PENDAPATAN		1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	0	%
Pendapatan Asli Daerah					
Hasil Retribusi Daerah					
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	0	%
BELANJA	24.576.619.707,00	22.634.196.360,00	1.942.423.347,00		%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	307.640.606,00		%
Belanja Pegawai	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	307.640.606,00		%
BELANJA LANGSUNG	19.511.752.000,00	17.876.969.259,00	1.634.782.741,00	84,65	%
Program Administrasi Perkantoran	2.506.886.000,00	2.255.688.052,00	251.197.948,00	89,98	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	770.429.000,00	691.725.675,00	78.703.325,00	89,78	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	89.802.000,00	87.436.000,00	2.366.000,00	97,36	%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.544.905.000,00	1.522.344.001,00	22.560.999,00	98,53	%
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	4.282.062.000,00	3.902.516.950,00	379.545.050,00	91,13	%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10.883.086.000,00	8.615.879.400,00	2.267.206.600,00	79,17	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000,00	3.975.000,00	0	100 %

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp16.710.053.000,00 terealisasi Rp14.040.740.351,00 atau 84,03%. Sisa anggaran sebesar Rp2.994.369.154,00 atau 15,35% antara lain bersumber dari: sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, efisiensi honor narasumber, serta belanja yang tidak direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran terdapat penghematan atas pemakaian sumberdaya yang menghasilkan efisiensi dari pembayaran rutin Belanja Telepon sebesar Rp9.736.843,00, Belanja Air Rp249.500,00, Belanja Listrik sebesar Rp17.163.512,00, Belanja Surat Kabar Rp6.480.000,00, Belanja Internet/Faximile Rp31.081.200,00, Belanja Paket/Pengiriman Rp9.000.000,00 tidak ada pengiriman paket, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp56.441.080,00 pembayaran sesuai waktu, tidak ada denda, tidak ada mutasi kendaraan;
 - b. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terdapat efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Luar: 102.696.777,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi maupun koordinasi ke Pusat tidak dilaksanakan karena Covid19, dimaksimalkan lewat daring, hanya untuk menghadiri beberapa undangan yang mendesak.
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional terdapat penghematan pada Belanja Jasa Servis senilai Rp12.365.000,00 serta Belanja Penggantian Suku Cadang: 57.111.200 karena penggantian suku cadang dan servis kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kendaraan.
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi terdapat efisiensi senilai Rp5.238.200,00 pada saat pengerjaan pemeliharaan ada beberapa belanja yang tidak direalisasikan disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
 - e. Pada kegiatan Pengelolaan Logistik Bencana terdapat penghematan karena darurat Covid sudah ada relawan di gudang jd tidak banyak memerlukan tambahan kecuali ada aktivitas khusus/mendadak, penghematan krn covid, distribusi sebagian besar langsung diambil oleh kab/kota, Sisa pengadaan barang dan jasa senilai Rp213.368.250,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
 - f. Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana terdapat penghematan pada Belanja bahan Material sebesar Rp. 15.842.500 karena Rasionalisasi Anggaran, Belanja perawatan kendaraan bermotor pada belanja jasa servis Rp. 9.105.00 dan penggantian suku cadang Rp. 56.337.000 karena Kendaraan tidak ditempat, Penggantian Fungsi Truck Water Treatment mejadi Towing tidak Cukup anggaran dan dialihkan di anggaran tahun selanjutnya, Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp. 4.280.000 karena Rasionalisasi Anggaran, Belanja modal sisa Rp. 2.054.200 karena Rasionalisasi Anggaran.

- g. Pada kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana terdapat sisa lelang kegiatan Rp. 2.267.206.100 untuk jasa konsultasi Rp. 2.182.500,- (IRBI, DRI dan Pengawasan penguatan tebing Plosokerep) sisa lelang konstruksi Rp. 2.265.023.013,- (Rehabilitasi Jalan Sedayu-Pandak, Rekonstruksi Jalan Barongan-Bibal, Rehabilitasi ruas Jalan Imogiri-Dodogan).

CALK BPBD DIY 2020

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

		2020	2019
1.1	<u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp1.390.856.513,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pendapatan-LRA BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp1.390.856.513,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1	<u>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LRA</u>	<u>Rp1.390.856.513,00</u>	<u>Rp0,00</u>
----------------	---	----------------------------------	----------------------

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp1.390.856.513,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA	Rp0,00	Rp0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah – LRA	Rp0,00	Rp1.390.856.513,00	0,00
	Jumlah	Rp0,00	Rp1.390.856.513,00	0,00

3.1.2	<u>Belanja</u>	<u>Rp22.634.196.360,00</u>	<u>Rp78.121.366.874,00</u>
--------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Belanja BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp24.576.619.707,00 dengan realisasi sebesar Rp22.634.196.360,00 atau 92,10% Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1	<u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp14.090.727.960,00</u>	<u>Rp24.021.152.528,00</u>
----------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Belanja Operasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp13.766.024.094,00 dan realisasi sebesar Rp14.090.727.960,00 atau 102,36 %, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai**Rp5.011.737.101,00****Rp7.320.087.724,00**

Belanja Pegawai BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp5.321.817.707,00 dan realisasi sebesar Rp5.011.737.101,00 atau 94,17 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	93,93
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LRA	4.346.928.973,00	4.148.925.980,00	95,44
b.	Tunjangan Keluarga-LRA	247.445.486,00	227.650.718,00	92,00
c.	Tunjangan Jabatan-LRA	268.940.000,00	191.090.000,00	71,05
d.	Tunjangan Fungsional-LRA	0	0	0
e.	Tunjangan Fungsional Umum-LRA	81.920.000,00	75.245.000,00	91,85
f.	Tunjangan Beras-LRA	106.704.836,00	103.777.860,00	97,26
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LRA	12.794.494,00	10.507.098,00	82,12
h.	Pembulatan Gaji-LRA	133.918,00	30.445,00	22,73
	Jumlah	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	93,93
2.	Honorarium PNS	60.780.000,00	59.730.000,00	98,27
	Jumlah	60.780.000,00	59.730.000,00	98,27
3.	Honorarium Non PNS	196.170.000,00	194.780.000,00	99,29
	Jumlah	196.170.000,00	194.780.000,00	99,29
	Jumlah Belanja Pegawai-LRA	5.321.817.707,00	5.011.737.101,00	94,17

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**Rp9.078.990.859,00****Rp16.701.064.804,00**

Belanja Barang dan Jasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 8.444.206.387,00 dan realisasi sebesar Rp 9.078.990.859,00 atau 107,52 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	304.583.799,00	301.133.600,00	98,87
2.	Belanja Jasa kantor	2.375.593.221,00	2.246.878.198,00	94,58

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	790.171.680,00	598.812.400,00	75,78
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.739.500,00	184.019.500,00	88,58
5.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	127.100.587,00	127.100.000,00	100,00
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.100.000,00	28.950.000,00	90,19
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.526.000,00	34.523.000,00	99,99
8.	Belanja Makanan dan Minuman	601.661.500,00	589.820.000,00	98,03
9.	Belanja Pakaian Kerja	524.687.000,00	524.286.750,00	99,92
10.	Belanja Perjalanan Dinas	447.948.000,00	331.391.223,00	73,98
11.	Belanja Pemeliharaan	450.255.000,00	441.027.875,00	97,95
12.	Belanja Jasa Konsultansi	715.391.500,00	709.120.600,00	99,12
13.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	361.905.000,00	352.905.000,00	97,51
	Jumlah	8.444.206.387,00	9.078.990.859,00	107,52

3.1.2.2 Belanja Modal

Rp 8.543.468.400,00

Rp 54.100.214.346,00

Belanja Modal BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp10.810.595.613,00 dan realisasi sebesar Rp 8.543.468.400,00 atau 79,03 %, dengan rincian sebagai berikut

3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Modal Tanah BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	0	0	0
	Jumlah			

Belanja Modal Tanah tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp0,00

3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp403.280.000,00

Rp 1.310.972.950,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp405.384.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp403.280.000,00 atau 99,48%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	71.500.000,00	71.000.000,00	99,30
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	100
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	247.070.000,00	246.330.000,00	99,70
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	69.514.200,00	68.950.000,00	99,19
5.	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10.800.000,00	10.500.000,00	97,22
	Jumlah	405.384.200,00	403.280.000,00	99,48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp403.280.000,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp0,00

Rp 825.104.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	Jumlah			

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

**3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan**

Rp8.140.188.400,00

Rp51.964.137.396,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp10.405.211.413,00 dan realisasi sebesar Rp8.140.188.400,00 atau 78,23 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	10.405.211.413,00	8.140.188.400,00	78,23
	Jumlah	10.405.211.413,00	8.140.188.400,00	78,23

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 51.964.137.396,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

3.1.3 Aset

Aset BPBD DIY per 31 Desember 2020 sebesar Rp108.966.147.160,38 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp61.572.540.961,78, Aset Tetap sebesar Rp46.123.136.698,60 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 8.559.333.400,00 dan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp8.479.865.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019 (Audited)
3.1.3.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp61.572.540.961,78</u>	<u>Rp223.759.000,00</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.919.630.320,78 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp88.015,00</u>	<u>Rp0,00</u>
--	---------------------------	----------------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.015,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 tersebut merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2020 namun belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.015,00 tersebut merupakan sisa uang persediaan yang belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah dan penerimaan potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara.

3.1.3.1.5 <u>Persediaan</u>	<u>Rp61.572.452.946,78</u>	<u>Rp 223.759.000,00</u>
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.572.452.946,78 dengan rincian sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	2020
1.	Bahan	Rp53.025.119.927,59
2.	Suku Cadang	Rp1.210.750,00
3.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp8.036.813.624,59
4.	Obat-obatan	Rp441.935.280,00
3.	Persediaan untuk urusan strategis	Rp67.373.364,60
	Jumlah	Rp61.572.452.946,78

3.1.3.2 Aset Tetap

Rp46.123.136.698,60

Rp71.539.474.192,58

Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp46.123.136.698,60 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1. Peralatan dan Mesin

Rp48.546.244.063,18

Rp25.437.267.583,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.546.244.063,18 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp678.330.000,00 berasal dari penambahan Alat Besar Darat Rp9.360.000,00, Penambahan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp445.000.000,00; Penambahan Alat Bengkel Bermesin Rp71.000.000,00 Penambahan Alat Kantor Rp6.500.000,00 Penambahan Alat Studio Rp38.750.000,00; Penambahan Alat Laboratorium yang berasal dari Alat Peraga Praktek Sekolah Rp19.700.000,00; Penambahan Alat Persenjataan Rp54.270.000,00 yang berasal dari Persenjataan Non Senjata Api Rp24.800.000,00 dan Alat Khusus Kepolisian Rp29.470.000,00; Penambahan Komputer Rp1.900.000,00; Penambahan Alat Keselamatan Kerja yang berasal dari Alat SAR Rp31.850.000,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp280.370.000,00 yang berasal dari Alat Angkutan Darat Bermotor Rp25.000.000,00; Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp246.420.000,00 yang berasal dari Alat Kantor sebesar Rp5.870.000,00 dan Meja Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp240.550.000,00; Alat Studio sebesar Rp8.950.000,00.

c. Hibah/Bantuan (bukan dari APBD)

Hibah/Bantuan (bukan dari APBD) sebesar Rp16.622.230.367,00 yang berasal dari Alat Besar Darat Rp39.122.500,00; Alat Bantu Rp94.221.000,00; Alat Angkutan Rp4.523.715.700,00; Alat Bengkel Bermesin Rp8.074.000,00; Alat Rumah Tangga Rp68.265.340,00; Alat Komunikasi Rp9.912.334.852,00; Peralatan Pemancar Rp35.475.000,00; Alat Kedokteran Rp50.050.000,00; Alat Praktek Peraga Sekolah Rp9.900.000,00; Alat Keselamatan Kerja Rp1.282.025.300,00 yang berasal dari Alat SAR Rp1.247.606.300,00 dan Alat Kerja Penerbangan Rp34.419.000,00 serta Peralatan Olah Raga sebesar Rp599.046.675,00.

d. Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp15.300.000,00 yang terdiri dari Alat Bantu sebesar Rp3.500.000,00; Alat Laboratorium berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Rp9.900.000,00; Peralatan Komputer Rp1.900.000,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp Rp48.546.244.063,18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020
	Peralatan dan Mesin	Rp48.546.244.063,18
1.	Alat-alat Besar Darat	Rp874.880.340,00
2.	Alat-alat Bantu	Rp2.514.206.578,00
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp18.946.045.049,00
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp471.799.000,00
5.	Alat Angkut Apung Bermotor	Rp503.288.500,00
6.	Alat Bengkel Bermesin	Rp127.439.000,00
7.	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp125.139.000,00
8.	Alat Ukur	Rp64.350.000,00
9.	Alat Pengolahan	Rp2.800.000,00
10.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Rp188.500.00,00
11.	Alat Kantor	Rp693.855.800,00
12.	Alat Rumah Tangga	Rp3.999.918.436,26
13.	Komputer	Rp1.618.061.395,00
14.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp465.531.000,00
15.	Alat Studio	Rp895.882.600,00
16.	Alat Komunikasi	Rp10.849.566.852,00
17.	Peralatan Pemancar	Rp136.415.000,00
18.	Alat Kedokteran	Rp2.253.406.454,64,00
19.	Alat Kesehatan	Rp138.729.318,55
20.	Unit-Unit Laboratorium	Rp469.974.364,73
21.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp19.700.000,00
22.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp1.300.00,00
23.	Senjata Api	Rp67.200.000,00
24.	Persenjataan Non Senjata Api	Rp554.648.400,00
25.	Alat Khusus Kepolisian	Rp132.920.000,00

No	Uraian	2020
26.	Alat SAR	Rp1.619.806.300,00
27.	Alat Kerja Penerbangan	Rp34.419.000,00
28.	Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Rp177.415.000,00
29.	Peralatan Olahraga	Rp599.046.675,00
	Jumlah	Rp48.546.244.063,18

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan

Rp9.308.799.350,00

Rp9.388.799.350,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.308.799.350,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020 sebesar Rp0,00, kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp80.175.000,00 terdiri dari reklasifikasi dari Rambu Tidak Bersuar ke Rambu-rambu Lalulintas Darat sebesar Rp80.175.000,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp9.308.799.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp9.308.799.350,00
2	Bangunan Gedung Instalasi	Rp0,00
3	Bangunan Tempat Ibadah	Rp0,00
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp0,00
	Jumlah	Rp9.308.799.350,00

3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp6.218.950.800,00

Rp6.218.950.800,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.218.950.800,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal Instalasi Pengaman Tahun 2020 sebesar Rp0,00 kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp6.218.950.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020
1.	Jalan	Rp101.175.000,00
2.	Jembatan	Rp1.384.093.000,00
3.	Instalasi Air Minum Bersih	Rp1.000.000,00
4.	Instalasi Pertahanan	Rp40.850.000,00
5.	Instalasi Pengaman	Rp4.364.332.000,00
6.	Jaringan Air Minum	Rp6.400.000,00
7.	Jaringan Listrik	Rp312.100.800,00
8.	Jaringan Telepon	Rp9.000.000,00
	Jumlah	Rp6.218.950.800,00

3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Rp8.559.333.400,00

Rp52.819.709.396,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.559.333.400,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.140.188.400,00 yang berasal dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp8.140.188.400,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp52.400.564.396,00 yang berasal dari Aset Tetap Renovasi Rp52.400.564.396,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp8.559.333.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020
1.	Buku	Rp20.566.500,00
2.	Barang-Barang Perpustakaan	Rp33.961.500,00
3.	Barang Bercorak Kebudayaan	Rp24.940.000,00
4.	Aset Tetap Renovasi	8.479.865.400,00
	Jumlah	Rp8.559.333.400,00

3.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Rp(26.510.190.914,58)

Rp(22.325.427.936,42)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(26.510.190.914,58) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24.317.885.186,25)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.432.743.890,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(759.561.838,33)
	Jumlah	(26.510.190.914,58)

3.1.3.3 Aset Lainnya

Rp1.270.469.500,00

Rp279.075.000,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.270.469.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

3.1.3.3.1 Aset Tak Berwujud

Rp1.193.853.000,00

Rp204.550.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.193.853.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah ATB sebesar Rp989.303.000,00 berasal dari penambahan Aset tidak berwujud lainnya Rp989.303.000,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang ATB sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo ATB per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp1.193.853.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp1.193.853.000,00
	Jumlah	Rp1.193.853.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.193.853.000,00 berupa Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp1.193.853.000,00

3.1.3.3.4 Aset Lain-lain **Rp448.695.000,00** **Rp168.325.000,00**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp448.695.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp280.370.000,00 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp280.370.000,00
- b. Mutasi kurang
Mutasi kurang ALL sebesar Rp0,00 terdiri dari mutasi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp0,00.
- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp448.695.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Lain-lain	Rp448.695.000,00
	Jumlah	Rp448.695.000,00

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp448.695.000,00

3.1.4 Kewajiban Rp36.084.028,00 Rp32.605.057,00

Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.084.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp36.084.028,00 Rp32.605.057,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.084.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Belanja Rp36.084.028,00 Rp32.605.057,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2020 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Jasa	Rp36.084.028,00
	Jumlah	Rp36.084.028,00

1.5 Ekuitas Rp108.930.063.132,38 Rp72.009.703.135,58

Saldo Ekuitas sebesar Rp108.930.063.132,38 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	72.009.703.135,58
	Surplus Defisit – LO	(254.348.487.668,20)
	Ekuitas SAL	
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	21.243.339.847,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	270.025.507.818,00
	Jumlah	108.930.063.132,38

	2020	2019
3.1.6 Pendapatan-LO	<u>Rp27.978.674.916,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.6.1 Pendapatan Luar Biasa-LO	<u>Rp27.978.674.916,00</u>	<u>Rp0,00</u>
---	-----------------------------------	----------------------

Pendapatan Luar Biasa-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp27.978.674.916,00

3.1.7 <u>Beban</u>	2020	2019
	<u>Rp282.327.162.584,20</u>	<u>Rp26.895.680.299,43</u>

Realisasi Beban BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp282.327.162.584,20 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1 <u>Beban Operasi</u>	<u>Rp 16,570,628,821.16</u>	<u>Rp26.895.680.299,43</u>
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Realisasi Beban Operasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.570.628.821,16 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp5,011,737,101.00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp7,262,138,242.00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp4,296,753,478.16 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 <u>Beban Pegawai</u>	<u>Rp5,011,737,101.00</u>	<u>Rp7.320.087.724,00</u>
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Realisasi Beban Pegawai BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5,011,737,101.00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp4.757.227.101,00
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	Rp4,148,925,980.00
b.	Tunjangan Keluarga	Rp227,650,718.00
c.	Tunjangan Jabatan	Rp191,090,000.00

d.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp75,245,000.00
e.	Tunjangan Beras	Rp103,777,860.00
f.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp10,507,098.00
g.	Pembulatan Gaji	Rp30,445.00
	Jumlah	Rp4.757.227.101,00
2.	Honorarium PNS	Rp59,730,000.00
	Jumlah	Rp59,730,000.00
3.	Honorarium Non PNS	Rp194,780,000.00
	Jumlah	Rp194,780,000.00
	Jumlah Beban Pegawai	Rp5,011,737,101.00

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp7.262.138.242,00

Rp16.642.986.137,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.262.138.242,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Jasa Kantor	Rp2.250.357.169,00
2.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp158.343.600,00
3.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp127.100.000,00
4.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	Rp28.950.000,00
5.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp34.523.000,00
6.	Beban Makanan dan Minuman	Rp589.820.000,00
7.	Beban Perjalanan Dinas	Rp331.391.223,00
8.	Beban Pemeliharaan	Rp441.027.875,00
9.	Beban Jasa Konsultasi	Rp709.120.600,00
10.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp352.905.000,00
11.	Beban Persediaan Barang Pakai Habis	Rp2.238.599.775,00
	Jumlah	Rp7.262.138.242,00

3.1.7.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp4.296.753.478,16**Rp2.932.606.438,43**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.296.753.478,16 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp3.854.818.177,83
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp186.175.987,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp255.759.313,33
	Jumlah	Rp4.296.753.478,16

3.1.7.1.4 Beban Luar Biasa Rp265.756.533.763,04**Rp0,00**

Realisasi Beban Luar Biasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp265.756.533.763,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Luar Biasa Lainnya	Rp265.756.533.763,04
	Jumlah	Rp 265.756.533.763,04

3.1.7.2 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional –LO

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp(254.348.487.668,20) berasal dari Pendapatan Luar Biasa-LO sebesar Rp27.978.674.916,00 dikurangi Beban sebesar Rp282.327.162.584,20.

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp108.930.063.123,38 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal Rp72.009.703.135,58 ditambah Surplus/Defisit-LO Rp(254.348.487.668,20), RK PPKD Rp21.243.339.847,00 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp270.025.507.818,00 seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	Rp72.009.703.135,58
	Surplus Defisit – LO	Rp(254.348.487.668,20)

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas SAL	
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	21.243.339.847,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	270.025.507.818,00
	Jumlah	108.930.063.132,38

CALK BPBD DIY 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun 2020 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun 2020 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran BPBD DIY Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPBD DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

KEPALA PELAKSANA

Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si
NIP.19630817 198909 1 001